

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut (Suwardjono, 2016; 9) akuntansi didefinisikan sebagai proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar (bahan olahan akuntansi) yang terjadi dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Menurut (T. M. Putra, 2013) Akuntansi merupakan bagian dari sistem informasi yang menghasilkan informasi keuangan yang relevan, sehingga akuntansi memiliki peranan yang sangat penting dalam memberikan informasi mengenai gambaran keuangan suatu perusahaan. Dalam prakteknya, hal ini ditegaskan oleh (Puspitaningtyas, 2017) bahwa penerapan pencatatan akuntansi akan membuat pelaku usaha dapat mengetahui kondisi keuangan usahanya (misalnya, dapat mengetahui arus kas usahanya, dapat mengetahui pendapatan usahanya, dapat mengetahui beban-beban usahanya).

Menyimpulkan dari beberapa pengertian di atas bahwa, akuntansi merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu informasi yang relevan tidak hanya bagi perusahaan itu sendiri tetapi juga bagi pihak yang berkepentingan di luar perusahaan seperti *investor*. Hal ini didukung oleh (Jensen & Meckling, 1976) dalam teori keagenan (*agency theory*) yang

menjelaskan bahwa perusahaan merupakan kumpulan kontrak (*nexus of contract*) antara pemilik sumber daya ekonomis (*principal*) dan manajer (*agent*) yang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya tersebut. Dalam hal ini, Teori tersebut lebih memperkuat pentingnya peranan akuntansi dalam setiap kegiatan usaha, tidak hanya bagi manajemen dalam pengambilan keputusan tetapi juga sebagai pertanggungjawaban kepada pihak yang berkepentingan diluar manajemen usaha yang dijalankan.

Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang biasa disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi kerakyatan mandiri dan berskala kecil yang pengelolaannya dilakukan oleh kelompok masyarakat, keluarga, atau perorangan (Purba, 2019). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sendiri dapat dijadikan sebagai sarana penggerak ekonomi bangsa mengingat peran penting yang ada pada kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah yakni sebagai penyerap tenaga kerja dengan angka yang cukup tinggi bagi perekonomian lokal daerah dan sudah tentu mempengaruhi perekonomian di Indonesia pada umumnya (T. M. Putra, 2013). Hal ini juga didukung oleh penelitian (Barus, Indrawaty, & Solihin, 2018), yang menyatakan bahwa kegiatan kewirausahaan yang dijalankan oleh EMKM (Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah) dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun, hal yang menjadi kendala EMKM adalah belum banyak EMKM yang mampu menyelenggarakan pencatatan, pembukuan bahkan pelaporan keuangan. Padahal

penyelenggaraan pencatatan, pembukuan dan pelaporan keuangan adalah hal penting yang perlu dilakukan oleh setiap entitas, agar entitas dapat mengevaluasi kinerja entitas setiap tahunnya.

Dalam memenuhi kebutuhan pelaporan keuangan terutama pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah atau disingkat dengan SAK-EMKM dan telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 18 Mei 2016 yang diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur pula dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. SAK EMKM ini sendiri telah efektif diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2018 (SAK EMKM, 2018)

Terkait dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) (Kurniawati, Nugroho, & Arifin, 2012) mencoba melihat Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan mengambil sampel 51 UMKM di Kota Salatiga dengan metode convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Salatiga sudah melakukan pencatatan atas penjualan, pembelian, persediaan, biaya gaji dan biaya lainnya. Sedangkan pelaporan yang dibuat meliputi laporan penjualan, pembelian, persediaan dan penggajian. Kendala yang menghambat UMKM dalam penerapan

akuntansi antara lain adalah latar belakang pendidikan, belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi dan belum ada kebutuhan terhadap penerapan akuntansi.

Sementara itu di tahun yang berbeda (Ismadewi, Herawati, & Atmaja, 2017) melakukan penelitian mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Sesuai Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, Dan Menengah (SAK EMKM) Pada Usaha Ternak Ayam Boiler. Diperoleh kesimpulan bahwa (1) Proses penyusunan laporan keuangan Usaha Ayam Boiler I Wayan Sudiarsa hanya menyusun catatan keuangan secara sederhana, (2) kendala yang dialami oleh Usaha Ayam Boiler I Wayan Sudiarsa dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM yaitu: (a) Faktor SDM (Sumber Daya Manusia) dalam keuangan, (b) Tingkat kompetensi, dan (c) Lingkup organisasi yang kecil, (3) Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM pada Usaha Ayam Boiler I Wayan Sudiarsa terdiri dari: (a) Laporan laba rugi dengan jumlah laba Rp.89.548.100, (b) Laporan posisi keuangan dengan jumlah aset Rp.214.548.100 serta jumlah utang dan modal Rp.214.548.100, (c) Catatan atas laporan keuangan.

Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini peneliti mencoba melihat sejauh mana penerapan akuntansi pada usaha penggilingan padi, lebih khusus yang ada di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango, apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu SAK EMKM atau belum. Menurut (Anwar, 2015)

penggilingan padi merupakan pusat pertemuan antara produksi paska panen, pengolahan dan pemasaran gabah/beras. Usaha penggilingan padi ini merupakan suatu usaha yang umumnya berada di kampung-kampung dan berdekatan dengan area persawahan. Bisnis ini bisa dikategorikan sebagai bisnis produksi, karena di dalam bisnis ini terdapat pengolahan beras mulai dari kering sawah dan akhirnya menjadi kering giling, kemudian melalui proses penggilingan sehingga menghasilkan beras yang siap untuk dipasarkan (Sumaryanti & Chotimah, 2018).

Penelitian ini dilakukan mengingat usaha penggilingan padi ini memiliki potensi yang sangat bagus, baik dalam meningkatkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, maupun sebagai ketahanan pangan yang dalam hal ini adalah beras. Dikutip dari sebuah situs berita (Bisnis.com, 01 Agustus 2017), jumlah penggilingan padi di Indonesia mencapai 182.191, dimana 8% diantaranya merupakan penggilingan padi besar dan 92% merupakan penggilingan padi kecil dan penggilingan padi kecil keliling. Hal ini bukan tanpa alasan, mengingat Negara Indonesia merupakan negara dengan tingkat konsumsi beras tertinggi di dunia, berdasarkan data tahun 2009 Indonesia menempati posisi pertama konsumsi beras dunia dengan tingkat konsumsi 139 kilogram per kapita per tahun, melebihi rata-rata konsumsi beras dunia sebesar 60 kilogram per kapita per tahun (Statista, 09 Agustus 2019).

Namun, berdasarkan pengamatan awal peneliti di lapangan, usaha penggilingan padi yang ada di lingkungan sekitar peneliti masih belum

sepenuhnya menerapkan sistem pencatatan akuntansi secara konsisten. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran para pelaku usaha mengenai pentingnya sistem pencatatan akuntansi terhadap usaha yang mereka jalankan, padahal dengan adanya sistem pencatatan akuntansi dapat memudahkan pelaku usaha melihat pergerakan usahanya secara lebih detail sehingga dapat dijadikan tolak ukur pengambilan keputusan. Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian tentang **“Analisis Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM Pada Usaha Mikro Dan Kecil Penggilingan Padi Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Akuntansi mempunyai peranan penting dalam menyediakan informasi dalam bentuk laporan keuangan tidak hanya bagi pihak manajemen tetapi juga pihak-pihak berkepentingan di luar manajemen.
2. Diterbitkannya standar akuntansi keuangan oleh Ikatan Akuntan Indonesia yang mengatur mengenai entitas mikro, kecil, dan menengah.
3. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam melakukan pencatatan keuangan terutama berdasarkan standar akuntansi yang ada.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM Pada Usaha Mikro dan Kecil Penggilingan Padi Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Berdasarkan SAK EMKM Pada Usaha Mikro dan Kecil Penggilingan Padi Di Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.5.1. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi Akademisi Sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya terkait tentang penerapan akuntansi pada usaha mikro dan kecil.
- 2) Memberikan masukan kepada peneliti tentang pentingnya pemahaman mengenai pentingnya akuntansi keuangan pada suatu usaha terutama usaha mikro dan kecil.

1.5.2. Manfaat Praktis

Sebagai sumbangan pemikiran kepada para pelaku ekonomi terutama ekonomi mikro dan kecil terhadap pentingnya menerapkan akuntansi pada setiap usaha yang dijalankan. Terutama pada para pelaku usaha mikro dan kecil penggilingan padi.